



**UNIVERSITAS JAYABAYA
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM**

Nomor : 144/Ka.Prog.Dok/PASCA/UJ/S3/VII/2015 Jakarta, 1 Juli 2015
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Kesediaan Menjadi Ko-Promotor I

Kepada Yth.

Dr. Hotma P. Sibuea, SH, MH

di

Jakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana penyusunan disertasi mahasiswa peserta Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jayabaya :

N a m a : **ASMAK UL HOSNAH**

N P M : 201302026203

Judul proposal :

**Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sebagai
Dasar Peniadaan Pidana Terhadap Dakwaan Tindak Pidana Korupsi Kepada
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor**

Melalui surat ini, kami mohon kesediaannya untuk menjadi Ko-Promotor disertasi mahasiswa tersebut atas permohonan langsung kepada Ko-Promotor dalam surat terlampir. Untuk keperluan ini dimohon lembar kesediaan terlampir diisi dan diserahkan kembali ke Sekretariat Program Doktor agar dapat diproses selanjutnya.

Demikian surat ini, atas kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Program Doktor Ilmu Hukum
Ketua,

Prof. Dr. H.R.T. Sri Soemantri M., SH

CC. Arsip.



**UNIVERSITAS JAYABAYA
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM**

Nomor
Lampiran
Perihal

FF/Ka.Prog.Dok/PASCA/UJ/S3/VIII/2015
1 (satu) lembar
: Kesediaan Menjadi Ko-Promotor II

Jakarta, 19 Agustus 2015

Kepada Yth.

Dr. Hotma P Sibuea, SH, MH

di

Jakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana penyusunan disertasi mahasiswa peserta Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jayabaya :

N a m a : **Rocky Marbun**

NPM : 201302026212

Judul proposal :

**TINDAKAN HUKUM KEPOLISIAN SEBAGAI OBYEK GUGATAN TATA
USAHA NEGARA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO. 30 TAHUN 2014
TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAH**

Melalui surat ini, kami mohon kesediaannya untuk menjadi Ko-Promotor disertasi mahasiswa tersebut atas permohonan langsung kepada Ko-Promotor dalam surat terlampir. Untuk keperluan ini dimohon lembar kesediaan terlampir diisi dan diserahkan kembali ke Sekretariat Program Doktor agar dapat diproses selanjutnya.

Demikian surat ini, atas kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Program Doktor Ilmu Hukum
Ketua,

Prof. Dr. H.R.T. Sri Soemantri M., SH

CC. Arsip.



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA

Jl. Sunter Permai Raya, Jakarta 14350 Telepon. (021) 64715666 - Fax. (021) 6410287
Email. info@uta45jakarta.ac.id - www.uta45jakarta.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA

No: 101 /SK-REK/UTA/PEMB-PROM/II/2017


TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING (PROMOTOR/KO-PROMOTOR) UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ujian Proposal dan Ujian Disertasi Program Doktor (S-3) Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta dipandang perlu membentuk Panitia Ujian Proposal dan Ujian Disertasi Program Doktor (S-3) Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta;
- b. bahwa untuk maksud butir (a) tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Tinggi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.
3. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.
- Memperhatikan : Surat Ketua Program Studi Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Nomor 021/Kaprodi/PDP/II/2017 tertanggal 12 Februari 2017 Perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor Tentang Pengangkatan Pembimbing (Promotor/Ko-Promotor).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat yang bersangkutan dibawah ini sebagai Ko Promotor I Program Doktor (S-3) Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta :
- Nama : **Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H.**
Jabatan Fungsional : **Lektor Kepala**
NIDN/NUPN : **0323035802**
- KEDUA : Beban membimbing proposal dan disertasi atas nama :
- | No | Nama Mahasiswa | NPM | Judul Disertasi |
|----|-------------------|------------|---|
| 1. | Tuti Widyaningrum | 1551000007 | Hak Konstitusional Penganut Agama/Kepercayaan Leluhur Terhadap Identitas Beragama Pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagai Konkretisasi Pengakuan Hak Sipil Dan Politik Dalam Negara Hukum Kesejahteraan. |
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kesalahan dan atau kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 FEBRUARI 2017
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
Rektor,




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA

Jl. Sunter Permai Raya, Jakarta 14350 Telepon. (021) 64715666 - Fax. (021) 6410287
Email. info@uta45jakarta.ac.id - www.uta45jakarta.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA

No: 84 /SK-REK/UTA/PEMB-PROM/XI/2017

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING (PROMOTOR/KO-PROMOTOR) UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ujian Proposal dan Ujian Disertasi Program Doktor (S-3) Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, dipandang perlu membentuk Panitia Ujian Proposal dan Ujian Disertasi Program Doktor (S-3) Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta;
- b. bahwa untuk maksud butir (a) tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Tinggi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta;
3. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Nomor : 349/Dekan.FH/PDP/XI/2017 tertanggal 23 November 2017 perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor Tentang Pengangkatan Pembimbing (Promotor/Ko-Promotor).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat yang bersangkutan di bawah ini sebagai Ko-Promotor 1 Program Doktor (S-3) Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta:
- Nama : **Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H.**
- Jabatan Akademik : **Lektor Kepala**
- NIDN/NUPN : **0323635802**
- KEDUA : Beban membimbing proposal dan disertasi atas nama :
- | No | NIM | Nama Mahasiswa | Judul Disertasi |
|----|------------|-------------------|---|
| 1. | 1651000001 | Moch. Nasser Amir | Kedudukan, Tugas, Dan Wewenang Komisi Kepolisian Nasional Dalam Perspektif Negara Hukum Demokratis. |
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada **24 November 2017** sampai **24 April 2018**.
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 29 November 2017

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
Rektor,

Dr. Virgo Simamora, M.B.A.

Tembusan:

DISERTASI

**PRINSIP-PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PEJABAT PEMERINTAH BERDASARKAN WEWENANG
DISKRESI DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM
KESEJAHTERAAN INDONESIA**

***THE PRINCIPLES OF CRIMINAL RESPONSIBILITY OF
GOVERNMENT OFFICIALS ARE BASED ON
DISCRETIONARY UTHORITY IN THE STATE REGULATION
OF INDONESIAN WELFARE LAW***



Oleh :

Asmak ul Hosnah

201302026203

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS JAYABAYA
JAKARTA
2019**

DISERTASI

**PRINSIP-PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PEJABAT PEMERINTAH BERDASARKAN WEWENANG
DISKRESI DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM
KESEJAHTERAAN INDONESIA**

***THE PRINCIPLES OF CRIMINAL RESPONSIBILITY OF
GOVERNMENT OFFICIALS ARE BASED ON
DISCRETIONARY AUTHORITY IN THE STATE REGULATION
OF INDONESIAN WELFARE LAW***



Oleh :

Asmak ul Hosnah

201302026203

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS JAYABAYA
JAKARTA
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PRINSIP-PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PEJABAT PEMERINTAH BERDASARKAN WEWENANG
DISKRESI DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM
KESEJAHTERAAN INDONESIA**

***THE PRINCIPLES OF CRIMINAL RESPONSIBILITY OF
GOVERNMENT OFFICIALS ARE BASED ON
DISCRETIONARY AUTHORITY IN THE STATE REGULATION
OF INDONESIAN WELFARE LAW***

Disusun Oleh :

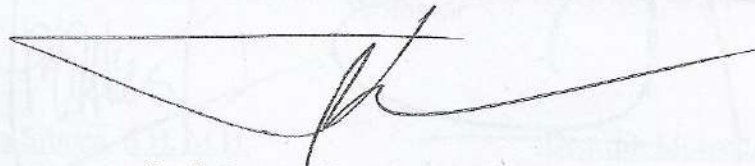
Asmak ul Hosnah

201302026203

22 JAN 2019

Telah disetujui untuk melaksanakan: Ujian Terbuka

KETUA PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM



Prof. Dr. JH. Sinaulan, S.H.M.Ag.M.Sc

Lembar Persetujuan Promotor

**PRINSIP-PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PEJABAT PEMERINTAH BERDASARKAN WEWENANG
DISKRESI DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM
KESEJAHTERAAN INDONESIA**

***THE PRINCIPLES OF CRIMINAL RESPONSIBILITY OF
GOVERNMENT OFFICIALS ARE BASED ON
DISCRETIONARY UTHORITY IN THE STATE REGULATION
OF INDONESIAN WELFARE LAW***

Disusun Oleh :

Asmak ul Hosnah

201302026203

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam
Bidang Ilmu Hukum Pada Program Doktor Ilmu Hukum di Program Pascasarjana
Universitas Jayabaya

Telah disetujui Untuk : Ujiah Terbuka

Oleh Tim Promotor:



Prof. Dr. Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara

Promotor

Dr. Hotma Sibuea, S.H. M.H.

Co Promotor I

Dr. Lilik Mulyadi, S.H. M.H.

Co Promotor

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS JAYABAYA

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister atau Doktor, baik di Universitas Jayabaya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Promotor dan para Penguji.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Jakarta, Januari 2019

Yang membuat Pernyataan



Asmak ul Hosnah

201302026203

ABSTRAK

Prinsip-Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pemerintah Berdasarkan Wewenang Diskresi Dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia

Kata Kunci : Asas Legalitas, Diskresi

Dalam bingkai negara hukum kesejahteraan, pemerintah memiliki 2 macam sumber kewenangan yaitu asas legalitas dan asas diskresi. Dalam praktek penyelenggaraan negara kedua wewenang tersebut bersifat saling melengkapi. Kewenangan pejabat pemerintah yang hanya bersumber dari asas legalitas, maka kesejahteraan umum sebagai tujuan negara kesejahteraan tidak mungkin tercapai. Kewenangan yang diperbincangkan dalam disertasi ini adalah kewenangan diskresi pejabat pemerintah yaitu kekuasaan bebas yang dijalankan tidak menurut atau mengikuti pertimbangan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan pejabat pemerintah mengambil suatu putusan berdasarkan wewenang diskresi memiliki potensi yang besar untuk disalahgunakan yang akibatnya terjadi penyalahgunaan wewenang yang mengandung konsekuensi dari sudut pandang hukum administrasi dan dari sudut pandang hukum pidana. Dalam praktik pemahaman tentang prinsip-prinsip pertanggungjawaban wewenang diskresi pejabat pemerintah diantara para penegak hukum masih berbeda-beda.

Penelitian ini menggunakan teori Negara Hukum Kesejahteraan sebagai **Grand Theory**, teori Diskresi sebagai **Middle Theory** dan teori Pertanggungjawaban Pidana sebagai **Applied Theory**.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Di samping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung data sekunder. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif.

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan(1) dari sudut pandang hukum administrasi, tindakan diskresi pejabat pemerintah (a). harus sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam undang-undang, (b) tidak boleh melanggar batas-batas yang ditetapkan dalam undang-undang, (c). tidak boleh melanggar persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang, (d). harus dilakukan dengan itikad baik, sesuai dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat dan untuk kepentingan umum, (e) harus dapat diterima akal sehat (rasional), (2). sudut pandang hukum pidana agar diskresi tidak dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum adalah sebagai berikut: (a). tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang sesuai dengan pandangan doktrin melawan hukum formil maupun materil, (b). tidak bertentangan dengan kepentingan umum, (d). tidak bertujuan untuk mencari keuntungan pribadi, keluarga atau kelompok. (e) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindakan Administrasi Pemerintahan yang diambil berdasarkan Asas Diskresi, sebagai bentuk penyimpangan dari ketidakmampuan Asas Legalitas dalam menjangkau kebutuhan dinamis masyarakat, tidak layak dan patut untuk dipidana. Sebaiknya pembentuk undang-undang menormatiskan asas *hulprecht* ke dalam setiap peraturan perundang-undangan dalam ranah hukum administrasi negara sepanjang bersifat *ultimum remedium*.

DISERTASI

**TINDAKAN HUKUM PENYELIDIK/PENYIDIK
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI OBJEK
GUGATAN TATA USAHA NEGARA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014
TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**

***LEGAL ACTION OF INVESTIGATOR POLICE DEPARTMENT
OF INDONESIA REPUBLIC AS AN OBJECT OF STATE
ADMINISTRATION ACCUSATION BASED ON GOVERNMENT
ADMINISTRATION ACT, 30/2014***



Oleh :

**ROCKY MARBUN
2013020226212**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS JAYABAYA
JAKARTA
2017**

DISERTASI

**TINDAKAN HUKUM PENYELIDIK/PENYIDIK
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI OBJEK
GUGATAN TATA USAHA NEGARA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014
TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**

***LEGAL ACTION OF INVESTIGATOR POLICE DEPARTMENT
OF INDONESIA REPUBLIC AS AN OBJECT OF STATE
ADMINISTRATION ACCUSATION BASED ON GOVERNMENT
ADMINISTRATION ACT, 30/2014***



Oleh :

**ROCKY MARBUN
2013020226212**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS JAYABAYA
JAKARTA
2017**

LEMBAR PERSETUJUAN

**TINDAKAN HUKUM PENYELIDIK/PENYIDIK
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI OBJEK
GUGATAN TATA USAHA NEGARA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014
TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**

***LEGAL ACTION OF INVESTIGATOR POLICE DEPARTMENT
OF INDONESIA REPUBLIC AS AN OBJECT OF STATE
ADMINISTRATION ACCUSATION BASED ON GOVERNMENT
ADMINISTRATION ACT, 30/2014***

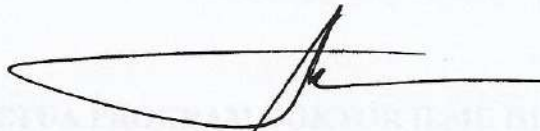
Disusun Oleh

**Rocky Marbun
2013020226212**

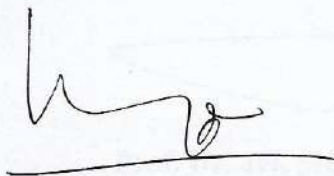
**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh
Gelara Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum Pada Program Doktor Ilmu
hukum di**

**Program Pascasarjana Universitas Jayabaya
Telah disetujui untuk : Ujian Tertutup**

Oleh Tim Promotor



**Prof. Dr. JH. Sinaulan., S.H., M.Ag., M.Sc.
Promotor**



**Prof. Dr. Bambang Widodo Umar, S.H., M.Si
Ko-Promotor I**



**Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H.
Ko-Promotor II**

LEMBAR PENGESAHAN

**TINDAKAN HUKUM PENYELIDIK/PENYIDIK KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI OBJEK GUGATAN TATA
USAHA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30
TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**

*LEGAL ACTION OF POLICE DEPARTMENT OF INDONESIA REPUBLIC AS AN
OBJECT OF STATE ADMINISTRATION ACCUSATION BASED ON GOVERNMENT
ADMINISTRATION ACT, 30/2014*

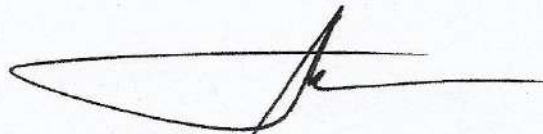
Disusun Oleh

Rocky Marbun
2013020226212

Telah disetujui untuk melaksanakan : Ujian Terbuka

Persetujuan pada tanggal.....

KETUA PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM



Prof. Dr. JH. Sinaulan., S.H., M.Ag., M.Sc.

**PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN
PASCASARJANA PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS JAYABAYA**

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister atau Doktor, baik di Universitas Jayabaya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Promotor dan para Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat akarya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Jakarta,Agustus 2017
Hormat Peneliti

Rocky Marbun

ABSTRAK

Judul Disertasi : Tindakan Hukum Penyelidik dan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Sebagai Objek Gugatan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Kata Kunci : Tindakan Hukum, Penyidik, Tata Usaha Negara

Penelitian ini didasarkan kepada tindakan hukum Penyelidik dan Penyidik terhadap aturan norma etik yang terkandung dalam Pasal 52 KUHAP dan Pasal 117 ayat (1) KUHAP yang sangat rentan terjadi pelanggaran dalam praktek hukum oleh Penyelidik dan Penyidik.

Pada Penelitian karya ilmiah ini, Peneliti menggunakan 3 (tiga) teori yaitu Teori Negara Hukum Pancasila sebagai *grand theory*. Sedangkan untuk *Middle Range Theory* Peneliti menggunakan Teori Sistem Hukum. Sedangkan pada *Applied Theory* Peneliti menggunakan Teori Penegakan Hukum.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Dari hasil penelitian dapat diperoleh bahwa Tindakan Hukum (*bestuurhandelingen*) Penyidik/Penyelidik Polri sebagai Pejabat Pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk perlindungan dan penghargaan atas Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam menentukan upaya hukum terhadap tindakan hukum (*bestuurhandelingen*) tersebut, maka melalui konsep *general administrative law* yang diletakan pada UU No. 30/2014 merupakan ranah dari Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam hal penentuan batas-batas bagi Penyidik Polri terhadap tindakan hukum (*bestuurhandelingen*) maka, selain berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pula berpedoman kepada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Mengacu kepada Pasal 117 ayat (1) KUHAP, maka terdapat pula Asas Bebas dari Tekanan sebagai suatu asas hukum dalam kaitannya dengan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan turunan dari asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*)

**PENGATURAN HAK KEBEBASAN BERKEYAKINAN
PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN
YANG MAHA ESA DALAM PERSPEKTIF
NEGARA HUKUM DEMOKRATIS
INDONESIA**

DISENTASI

**Karya Tulis Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Doktor Ilmu Hukum**



Gleb :

Nama : Tuti Widyaningrum

NPM : 1551900007

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM**

2019

**PENGATURAN HAK KEBEBASAN BERKEYAKINAN
PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN
YANG MAHA ESA DALAM PERSPEKTIF
NEGARA HUKUM DEMOKRATIS
INDONESIA**

DISERTASI

**Karya Tulis Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Doktor Ilmu Hukum**



Oleh :

Nama : Tuti Widyaningrum

NPM :1551000007

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA DISERTASI

JUDUL : **PENGATURAN HAK KEBEBASAN
BERKEYAKINAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN
TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DALAM
PERSPEKTIF NEGARA HUKUM DEMOKRATIS
INDONESIA.**

Disusun Oleh Mahasiswa

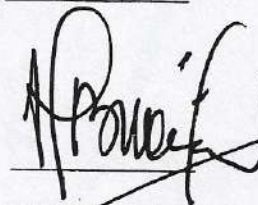
Nama : Tuti Widyaningrum
NPM : 1551000007
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum

Tanda Tangan Tanggal

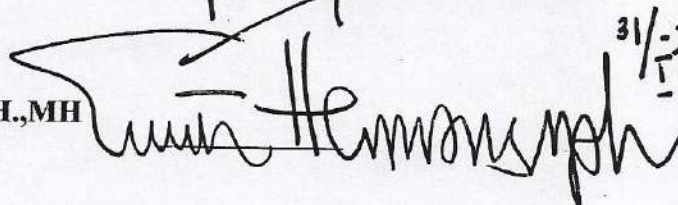
Prof. Dr. Bintan R. Saragih., S.H
(Promotor)

 4/2 2019


Dr. Hotma P. Sibuea., S.H., M.H
(Ko-Promotor I)

 28/07/2019

Dr. H. Erwin Owan Hermansyah S., SH., MH
(Ko-Promotor II)

 31/1-2019

Jakarta, 4 Februari 2019
Mengetahui
Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Ketua



Prof. Dr. Waty Suwarty Haryono., SH., MH

PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tuti Widyaningrum
NPM : 1551000007
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Papanggo Raya No.97-99 Papanggo Jakarta Utara
No.Telp/HP : 081804572485

Menyatakan bahwa :

1. Disertasi ini adalah asli dan merupakan hasil karya sendiri bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan Penulis, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari hasil karya orang lain. Disertasi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Dalam Disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka;
3. Pernyataan ini dibuat dengan benar, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Disertasi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, ... 4 Februari 2019

METERAI
TEMPEL
TOL
9C272AEF299487511

6000
ENAM RIBU RUPIAH



Tuti Widyaningrum

**PENGUATAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG
KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL DALAM PERSPEKTIF
SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA SEBAGAI NEGARA
HUKUM DEMOKRATIS**

UJIAN TERTUTUP DISERTASI

**Karya Tulis Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum**



Disusun Oleh:

Nama : Muhammad Nasser Amir

NPM : 1651000001

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN
UJIAN TERTUTUP DISERTASI



PENGUATAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG KOMISI
KEPOLISIAN NASIONAL DALAM PERSPEKTIF SISTEM
Pemerintahan Negara Republik Indonesia
SEBAGAI NEGARA HUKUM DEMOKRATIS

Disusun Oleh:

Nama : Muhammad Nasser Amir

NPM : 1651000001

Disetujui Untuk Mengikuti Ujian Tertutup Disertasi

Jakarta, Februari 2021

Kaprodi Doktor Ilmu Hukum

Dr. Rio Christiawan, SH., M.Hum., M.Kn

**LEMBAR PERSETUJUAN
PROMOTOR & KO PROMOTOR**

JUDUL : Penguatan Kedudukan, Tugas dan
Wewenang Komisi Kepolisian Nasional
dalam Perspektif Sistem Pemerintahan
Negara Republik Indonesia sebagai
Negara Hukum Demokratis

Disusun Oleh Mahasiswa

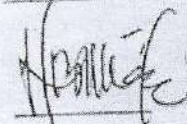
Nama : Muhammad Nasser Amir
NPM : 1651000001
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum

Tanda Tangan Tanggal

Prof. Dr. Bintan R. Saragih.,
S.H (Promotor)


Dr. Hotma P.
Sibuea.,S.H.,M.H
(Ko-Promotor I)

Dr. H. Erwin Owan
Hermansyah S.,SH.,MH
(Ko-Promotor II)



22/11/17

Mengetahui
Kaprosdi Doktor Ilmu Hukum


Dr. Rio Christilwan,SH.,M.Hum.,M.Kn

PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama lengkap : Muhammad Nasser Amir
NPM : 1651000001
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum
Alamat :
No.Telp/HP :
Email :
Judul Disertasi : Penguatan Kedudukan, Tugas
dan Wewenang Komisi Kepolisian
Nasional dalam Perspektif Sistem
Pemerintahan Negara Republik
Indonesia sebagai Negara Hukum
Demokratis

Menyatakan bahwa:

1. Disertasi ini adalah asli dan merupakan hasil karya sendiri bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan penulis, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari hasil karya orang lain. Disertasi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Dalam Disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka
3. Pernyataan ini di buat dengan benar, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Disertasi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, Februari 2021

Muhammad Nasser Amir

KATA PENGANTAR

Puji Syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rakhmat dan Karunianya, peneliti dapat menyelesaikan penulisan penelitian disertasi ini. Hasil Penelitian Disertasi ini dapat terselesaikan dengan baik berkat dukungan para pihak sehingga penulis tetap bersemangat menyelesaikannya ditengah Pandemi Covid-19.

Penulis sangat berharap penelitian ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan dalam hukum tata negara yang berkaitan dengan perbaikan kualitas Kopolnas sebagai lembaga pemerintah yang mampu membantu Presiden dalam bidang perpolisian di Indonesia. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam penelitian ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan penelitian di masa mendatang

Ucapan terima kasih yang tak terhingga peneliti sampaikan kepada Profesor, Bapak, Ibu yang terhormat :

1. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Bapak J. Rajes Khana.,M.Sc (Comp).
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Bapak Wagiman.,S.Fil.,SH.,MH
3. Dr. Rio Christiawan.,SH.,M.Hum.,M.Kn selaku Ketua Program Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

4. Prof.Dr. Bintan R. Saragih, SH. Selaku Promotor yang telah memberikan semangat untuk melanjutkan penulisan Ujian Tertutup disertasi ini.
5. Dr.Hotma Pardomuan Sibuea,S.H.,M.H. Selaku Co Promotor 1 yang tak bosan-bosan nya selalu memberikan motivasi, dorongan dan masukan sehingga peneliti dapat menyelesaikan Ujian Tertutup disertasi ini.
6. Dr. H. Owan Erwin Hermansyah,S.H.,M.H Selaku Co Promotor 2 yang memberikan semangat penulis untuk menyelesaikan Ujian Tertutup Disertasi ini.

Semoga Hasil Ujian Tertutup Disertasi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum tata negara khususnya dalam bidang perpolisian di Indonesia.

Jakarta Januari 2021

Muhammad Nasser Amir

**PENGUATAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG KOMISI
KEPOLISIAN NASIONAL DALAM PERSPEKTIF SISTEM
PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI NEGARA
HUKUM DEMOKRATIS**

ABSTRAK

Pemisahan kekuasaan Negara dengan mekanisme check and balance antara lembaga Negara merupakan formula efektif dalam mengatasi penumpukkan kekuasaan pada satu cabang kekuasaan Negara. Oleh karena itu pasca amandemen UUD 1945 banyak muncul lembaga Negara penunjang pelaksanaan pemerintahan, baik di lembaga yudikatif maupun eksekutif. Pada ranah eksekutif muncul Kompolnas sebagai lembaga pembantu Presiden dalam bidang kepolisian. Namun demikian sejak dibentuk tahun 2005 sampai sekarang, kinerja Kompolnas belum menunjukkan hasil yang signifikan terkait tugas dan wewenangnya. Penelitian disertasi ini hendak mengkaji 1). Apakah wewenang dan tugas Kompolnas saat ini dapat membuat lembaga negara tersebut mampu melaksanakan tugasnya dalam menetapkan arah kebijakan POLRI dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri? dan 2). Wewenang dan tugas apa yang perlu diberikan kepada Kompolnas supaya dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik dalam perspektif Negara Hukum Demokratis?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan hukum. Hasil penelitian ini berkesimpulan bahwa 1) tugas dan wewenang Kompolnas saat ini belum mampu membuat Kompolnas dapat menjalankan tugasnya dalam menetapkan arah kebijakan POLRI dan memberikan pertimbangan kepada presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. 2). Agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik diperlukan perubahan kedudukan dan penambahan tugas serta wewenang Kompolnas agar sesuai dengan perspektif Negara hukum demokratis. Rekomendasi penelitian ini adalah 1). Diperlukan perubahan kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang Kompolnas dalam Perpres No.17 Tahun 2011 tentang Kompolnas, 2). Perubahan kedudukan dan penambahan tugas serta wewenang yang diperlukan Kompolnas adalah tugas dan wewenang yang seharusnya dimiliki oleh lembaga Negara otonom yang independen. Perubahan kedudukan tugas dan wewenang yang mendukung independensi fungsi pengawasan eksternal tersebut harus dilakukan melalui peningkatan status kompolnas dalam suatu UU tersendiri.

Kata kunci : Check and Balance, Kewenangan, Kompolnas,

**STRENGTHENING THE POSITION, DUTIES AND AUTHORITY OF THE
NATIONAL POLICE COMMISSION IN THE PERSPECTIVE OF THE
STATE GOVERNMENT SYSTEM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AS A DEMOCRATIC LEGAL STATE**

ABSTRACT

Separation of power with a check and balance mechanism between State institutions is an effective formula in overcoming the accumulation of power in one branch of State power. Therefore, after the amendment of the 1945 Constitution, many state auxiliary organs that support the implementation of government have emerged, in yudicial and also in executive. In the executive branch, Kompolnas appears as an auxiliary institution to the President in the field of police task. However, since its inception in 2005 until now, Kompolnas' performance has not shown significant results regarding its duties and authorities. This research will answer about 1) Whether the current powers and duties of Kompolnas can enable these state institutions to carry out their duties in determining the direction of POLRI policies and to give consideration to the President in the appointment and dismissal of the National Police Chief. 2). What powers and duties need to be given to Kompolnas so that it can carry out its duties and authorities properly from the perspective of a democratic rule of law. This research using Yuridis Normative Method with statute approach, conceptual approach and comparative law approach. The conclusions of this research is 1). The current duties and powers of Kompolnas have not been able to enable Kompolnas to carry out its duties in determining POLRI policy direction and to give consideration to the president in the appointment and dismissal of the National Police Chief.2). In order to carry out its duties properly, it is necessary to change the position and increase the duties and powers of Kompolnas so that it is in line with the perspective of a democratic law state. The recommendation of this research is 1). It is necessary to change the position, duties, functions and authority of Kompolnas in Presidential Decree No.17 of 2011 concerning Kompolnas, 2). Changes in position and additional duties and powers required by Kompolnas are the duties and powers that should be owned by an independent autonomous state institution. Changes in the position of duties and powers that support the independence of the external supervisory function must be carried out through an increase in the status of Kompolnas in a separate law.

Kata Kunci: Check and Balance, Authority, Kompolnas.